

**ANALISIS KESESUAIAN ARAHAN FUNGSI KAWASAN TERHADAP
PENGUNAAN LAHAN DENGAN PEMANFAATAN SIG DI
KABUPATEN PATI TAHUN 2016**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Geografi Fakultas Geografi**

Oleh:

AHMAD DURI

E100140101

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYHA SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KESESUAIAN ARAHAN FUNGSI KAWASAN TERHADAP
PENGUNAAN LAHAN DENGAN PEMANFAATAN SIG DI
KABUPATEN PATI TAHUN 2015
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

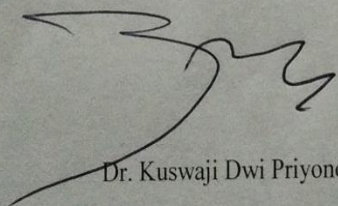
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**AHMAD DURI
E100140101**

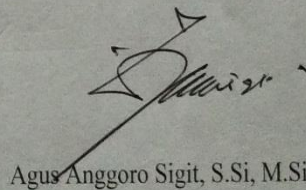
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen
Pembimbing I



Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si

Dosen
Pembimbing II



Agus Anggoro Sigit, S.Si, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KESESUAIAN ARAHAN FUNGSI KAWASAN TERHADAP
PENGUNAAN LAHAN DENGAN PEMANFAATAN SIG DI
KABUPATEN PATI TAHUN 2015
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

OLEH

AHMAD DURI
E100140101

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Geografi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 15 Oktober 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Agus Anggoro Sigit, S.Si, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Suharjo, M.S
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)



Drs. H. Priyono, M.Si

NIK. 331

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Oktober 2016



Ahmad Duri
E100140101

**ANALISIS KESESUAIAN ARAHAN FUNGSI KAWASAN
TERHADAP PENGGUNAAN LAHAN DENGAN PEMANFAATAN SIG
DI KABUPATEN PATI TAHUN 2015**

Analysis of Suitability Direction Functions Area to Landuse with Utilization SIG in District Pati 2015

Ahamad Duri¹, Kuswaji Dwi Priyono², Agus Anggoro Sigit²

¹Mahasiswa Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Staf Pengajar Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Duriahmad13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai kesesuaian arahan fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Pati. Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui arahan fungsi kawasan, (2) mengetahui kondisi penggunaan lahan eksisting (3) menganalisis kesesuaian antara fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Pati.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode survei dengan pendekatan analisis kuantitatif berjenjang. Metode survei bertujuan untuk mengetahui kondisi penggunaan lahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan, sedangkan analisis kuantitatif berjenjang digunakan untuk memperoleh data arahan fungsi kawasan dengan menggunakan parameter data seperti curah hujan, jenis tanah dan lereng di Wilayah Kabupaten pati. Pengambilan sample penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang artinya pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Analisis spasial yang berupa Sistem Informasi Geografis berfungsi untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan bantuan software GIS.

Hasil penelitian didapat luas kesesuaian penggunaan lahan dengan arahan fungsi kawasan di Wilayah Kabupaten Pati sebesar 1.253,96 km² atau 79,35 % dari luas seluruh wilayah, sedangkan luas penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan sebesar 326,27 km² atau 20,65 % dari luas seluruh wilayah yaitu 1580,23 km². Berdasarkan hasil yang diperoleh penggunaan lahan yang sudah sesuai dengan arahan fungsi kawasan harus dipertahankan. Sebaliknya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah setempat agar tidak merugikan masyarakat merusak alam.

Kata Kunci: Kesesuaian, Arahan fungsi kawasan, Penggunaan lahan, Daerah sesuai dan tidak sesuai.

ABSTRACT

Research on the suitability of direction functions area on the use of land in the district Pati. The purpose of this study was to, (1) Knowing the direction of the area function (2) Knowing the condition of existing landuse, (3) Analysis of suitability direction functions area to landuse with utilization SIG in district Pati 2015.

The research method used is survey method with approach a quantitative analysis tiered. The survey method aims to determine the condition landuses of appropriate and not accordance with the direction of function of the area, while the analysis quantitative tiered used to obtain data on the direction functions area using data parameters such as rainfall, soil type and slope in Regency Pati. Taking sampling this study using purposive sampling method, which means in deliberate taking samples in accordance with the requirements of sample required. Spatial analysis that such as the Geographic Information System serves to identify suitability land appropriate and not accordance with the help of GIS software.

The result research is be obtained wide suitability landuse with direction functions area in Pati regency of 1253.96 km² or 79.35% of the entire area, while the area of landuse that is not appropriate with direction functions area of 326.27 km² or 20.65 % of total area is 1580.23 km². Based on the results of landuse that are in Appropriate with referral function of the area must be maintained. Instead of land use that is not in accordance with direction functions area must be done monitoring by the local government in order not to harm the public harm the environment.

Keywords: Suitability, Direction Functions Area, Landuse, Regional Appropriate and Not Appropriate.

1. PENDAHULUAN

Persoalan mengenai lahan dan pemanfaatannya seringkali muncul bersamaan dengan perkembangan suatu kawasan. Semakin besar dan berkembang suatu kawasan, maka semakin berkembang pula permasalahan yang muncul. Salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian lahan terhadap jenis penggunaannya. Penggunaan lahan yang baik harus memperhatikan keterbatasan fisik lahan karena setiap lahan memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda guna mendukung penggunaannya. Pemanfaatan lahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007. Peraturan-peraturan tersebut mengatur sedemikian rupa tentang pemanfaatan ruang dan lahan. Undang-undang tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arahan fungsi kawasan, tujuannya agar kondisi lahan sesuai dengan peruntukannya dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan di daerah konservasi atau lindung. Akibat dari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan akan berdampak pada ketidakseimbangan ekologi dan berpotensi bencana. Penetapan fungsi kawasan sangat penting guna menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan keselamatan, kesejahteraan serta kenyamanan hidup.

Kabupaten Pati merupakan daerah saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dari jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat, sementara itu ketersediaan akan lahan kosong semakin sedikit. Kondisi ini dapat dilihat dari perubahan tata guna lahan Kabupaten Pati yang terus mengalami perubahan seiring adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Terhitung pada tahun 2007 sampai 2010 banyak terjadi perubahan pada luas lahan (Data Spasial Kabupaten Pati tahun 2007 dan 2010). Pada tahun 2007 luas permukiman sebesar 20.796,4 ha, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 20.801,7 ha. Perubahan lahan tidak terjadi pada permukiman, tetapi hutan, kebun, sawah irigasi, sawah tadah hujan serta tegalan juga mengalami perubahan. Adanya fenomena tersebut maka perlu dilakukan evaluasi penggunaan lahan yang ada terhadap arahan fungsi kawasan. Tujuannya mengurangi resiko terjadinya ketidak sesuaian lahan terhadap arahan fungsi kawasan yang ada di wilayah Kabupaten Pati.

Identifikasi lahan sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan lahan yang ada sudah sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Pemanfaatan teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis merupakan jalan keluar untuk mengetahui masalah tersebut. Melalui Pengindraan Jauh dapat dilakukan pengumpulan data pada suatu daerah tanpa harus mendatangi secara langsung daerah yang dikaji agar dapat menghemat waktu dan biaya. Pembuatan rumusan tentang arahan fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Pati akan lebih efektif dan efisien apabila informasinya dapat disajikan secara spasial, sehingga batas-batas serta posisi untuk setiap daerah dan jenis lahan dapat diketahui dengan pasti. Sistem Informasi Geografis merupakan metode yang paling cocok digunakan untuk mengolah dan menganalisis data spasial, attribute dan informasi lainnya. Tujuannya untuk memudahkan mengetahui penggunaan lahan yang tidak sesuai dan sesuai dengan arahan fungsi kawasan secara cepat dan akurat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. bagaimana arahan fungsi kawasan di Kabupaten Pati tahun 2015,
2. bagaimana agihan penggunaan lahan wilayah Kabupaten Pati tahun 2015, dan
3. bagaimana kesesuaian antara arahan fungsi kawasan dengan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Pati tahun 2015.

Penelitian kesesuaian arahan fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai arahan dan informasi kepada masyarakat agar memperhatikan kondisi fungsi lahan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatan lahan.
2. Memberikan Informasi mengenai kondisi penggunaan lahan yang sesuai maupun tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan atau rujukan untuk mengambil kebijakan dalam proses pemanfaatan lahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan analisis kuantitatif berjenjang. Data-data diproses menggunakan Skor yang sudah ditentukan. Pengharkatan berjenjang ini dilakukan tiap unsur pada parameter agar sesuai dengan besaran kontribusi tiap unsur terhadap model yang dikembangkan yang diperoleh dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 41 Tahun 2007.

a. Factor Kemiringan Lereng

Tabel 1. Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Kemiringan Lereng

NO	Kelas	Kelerengan (%)	Klasifikasi	Skor
1	I	0 – 8	Datar	20
2	II	8 – 15	Landai	40
3	III	15 – 25	Agak Curam	60
4	IV	25 – 40	Curam	80
5	V	> 40	Sangat Curam	100

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007

b. Faktor Jenis Tanah

Tabel 2. Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Jenis Tanah

NO	Kelas	Jenis Tanah	Klasifikasi	Skor
1	I	Aluvial, Glei, Planosol, Hidromoft, laterik air tanah.	Tidak Peka	15
2	II	Latosol.	Kurang Peka	30
3	III	Brown forest soil, non calcic brown mediteran, Kambisol.	Agak Peka	45
4	IV	Andosol, Laterit, Grumusol, Podsol, Podsollic.	Peka	60
5	V	Regosol, Litosol, Organosol, Rensina.	Sangat Peka	75

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007

c. Faktor Intensitas Curah Hujan

Tabel 3. Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Intensitas Hujan Harian Rata- Rata

No	Kelas	Intensitas Hujan (mm/hari)	Klasifikasi	Skor
1	I	0 – 13,6	Sangat rendah	10
2	II	13,6 – 20,7	Rendah	20
3	III	20,7 – 27,7	Sedang	30
4	IV	27,7 – 34,8	Tinggi	40
5	V	> 34,8	Sangat Tinggi	50

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah mengintegrasikan hasil pengolahan data penginderaan jauh dengan analisis sistem informasi geografis menggunakan teknik overlay atau tumpang susun beberapa parameter yaitu curah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah hasilnya akan berupa peta arahan fungsi kawasan. Formura pembuatan peta arahan fungsi kawasan.

$$AFK = KL + JT + CH$$

Keterangan:

AFK = Skor Total Arahan Fungsi Kawasan

KL = Skor Kemiringan Lereng

JT = Skor Jenis tanah

CH = Skor Curah Hujan

Sumber: Formula menggunakan sistem GIS (*ArcGIS 10.1*)

d. Skor Kreteria Penetapan Kawasan Lindung dan Budidaya

Tabel 4. Skor Kreteria Penetapan Kawasan Lindung dan Budidaya

No	Fungsi Kawasan	Total Skor
1	Kawasan Lindung	≥ 175
2	Kawasan Penyangga	125 – 174
3	Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan	< 124
4	Kawasan Tanaman Semusim dan Permukiman	< 124 dan lereng $< 8\%$

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007

Data penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini adalah *citra Quickbird 2012* dan *citra Google Earth 2015*. Citra tersebut akan menghasilkan informasi berupa penggunaan lahan *eksisting* (terbaru) untuk bahan *overlay* dengan peta arahan fungsi kawasan, sehingga menghasilkan peta kesesuaian penggunaan lahan. Metode selanjutnya menggunakan pendekatan survei lapangan dengan cara observasi untuk membutikan dan membenarkan hasil penelitian dengan keadaan nyata di lapangan. Metode sampling yang digunakan dalam melakukan survei lapangan yaitu *purposive sampling*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

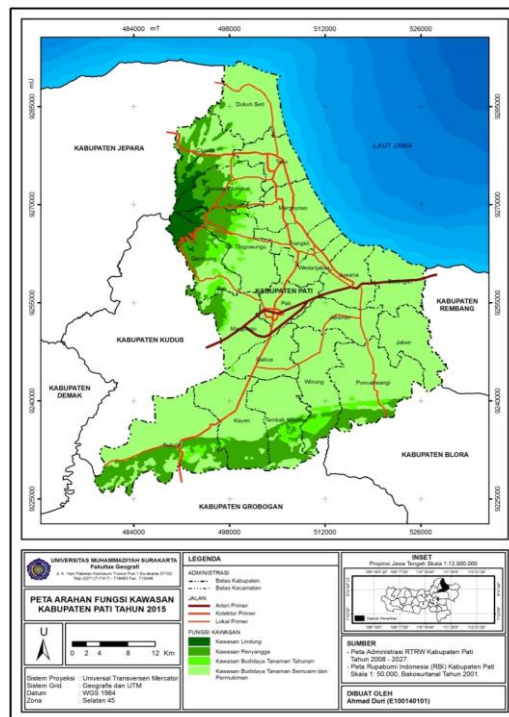
3.1 Arahan fungsi Kawasan

Berdasarkan pengolahan hasil skoring dan *overlay* ketiga kriteria penentu yang telah dilakukan dalam penelitian ini, arahan fungsi kawasan di Kabupaten Pati terdiri atas empat fungsi kawasan yaitu arahan kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya tanaman tahunan, dan kawasan budidaya tanaman semusim serta permukiman. Hasil arahan fungsi kawasan yang mendominasi di Kabupaten Pati adalah kawasan dengan fungsi budidaya tanaman semusim dan permukiman dengan luas mencapai 1227,32 km² atau lebih setengah dari luas daerah penelitian dengan persentase 77,67%. Kawasan kedua yang mendominasi adalah penyangga dengan luas mencapai 244,06 Km² atau sekitar 15,44% dari daerah penelitian. Kawasan ketiga yang mendominasi adalah budidaya tanaman tahunan dengan luas 66,17 km² atau sekitar 4,19% dari daerah penelitian. Kawasan yang memiliki daerah paling sempit di antara tiga kawasan adalah lindung dengan luas 42,68 km² atau sekitar 2,70% dari daerah penelitian.

Tabel 5. Arahkan Fungsi Kawasan di Kabupaten Pati Tahun 2015

No	Fungsi Kawasan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Lindung	42,68	2,70
2	Penyangga	244,06	15,44
3	Budidaya Tanaman Tahunan	66,17	4,19
4	Budidaya Tanaman Semusim dan Permukiman	1227,32	77,67
Total		1580,23	100

Sumber: Hasil Pengolahan data dan Analisis Data, 2015



Gambar 1. Peta Arahkan Fungsi Kawasan Kabupaten Pati Tahun 2015

3.2 Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2015

Peta penggunaan lahan Kabupaten Pati tahun 2015 diperoleh dari proses interpretasi menggunakan citra *Quickbird tahun 2012* dan citra *Google Earth 2015* dengan cara menginterpretasi dan mengklasifikasikan jenis lahan dalam gambar citra menggunakan *software GIS (ArcGIS 10.1)*. Proses dijitasi dengan cara deliniasi untuk mendapatkan jenis lahan yang terdapat di Kabupaten Pati. Penggunaan lahan di Kabupaten Pati dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu permukiman, kebun, tegalan/ladang, sawah, hutan, tambak dan perairan.

Tabel 6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pati Tahun 2015

No	Jenis Penggunaan Lahan	Cakupan Kecamatan	Luas (Km ²)	Persen (%)
1	Hutan	Sebagian kecamatan Gembog, Tlogowungu, Gunung Wunkal dan Cluwak	23,27	1,47
2	Permukiman	Seluruh Kecamatan	208,21	13,17
3	Tambak	Sebagian Kecamatan Dukuh Seti, Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, Juwana dan Batangan.	105,65	6,69
4	Tegalan	Seluruh Kecamatan	277,44	17,56
5	Perairan	Sebagian Kecamatan Gembong, Tayu dan Juwana	2,15	0,14
6	Kebun	Sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambak Kromo, Winong, Puncakwangi, Jaken, Dukuh Seti, Cluwak, Gunung Wungkal, Tlogowungu dan Gembong	226,68	14,34
7	Sawah	Seluruh Kecamatan	736,83	46,63
Total Luas			1.580,23	100

Sumber: Hasil Analisis Peta Penggunaan Lahan Kab. Pati Tahun 2015

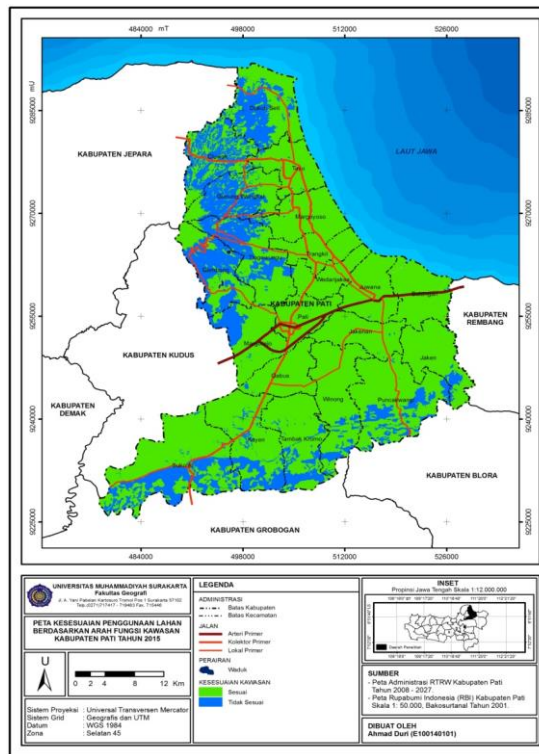
3.3 Kesesuaian Arah Fungsi Kawasan Terhadap Penggunaan Lahan di Kabupaten Pati Tahun 2015

Kesesuaian arahan fungsi kawasan terhadap penggunaa lahan di Kabupaten Pati menunjukkan sebesar 79,35% penggunaan lahan sesuai, dan 20,65% tidak sesuai. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Pati sudah sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Tingkat persentase ketidaksesuaian tertinggi berada pada penggunaan lahan yang terdapat di arahan fungsi kawasan penyangga, yakni 10,1% dari luas seluruh daerah. Sisanya 10,55% ketidaksesuaian penggunaan lahan terdapat pada arahan fungsi lindung, arahan budidaya tanaman tahunan, dan arahan budidaya tanaman musiman dan permukiman.

Tabel 7. Kesesuaian Arahan Fungsi Kawasan Terhadap Penggunaan Lahan di Kabupaten Pati

No	Arahan Fungsi Kawasan	Penggunaan lahan				Total (km ²)	Total (%)
		Sesuai		Tidak Sesuai			
		km ²	%	km ²	%		
1	Lindung	23,02	1,47	19,66	1,23	42,68	2,70
2	Penyangga	84,42	5,34	159,64	10,1	244,06	15,44
3	Budidaya Tanaman Tahunan	29,81	1,87	36,36	2,32	66,17	4,19
4	Budidaya Tanaman Semusim dan Permukiman	1116,71	70,67	110,61	7	1227,32	77,67
Total		1.253,96	79,35	326,27	20,65	1.580,23	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Analisis Data, 2015



Gambar 2. Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan Berdasarkan Arahan Fungsi Kawasan Kabupaten Pati Tahun 2015

Penggunaan lahan yang sudah sesuai dengan arahan fungsi pemanfaatan lahan harus dipertahankan. Pengawasan serta penjagaan dilakukan agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang nantinya dapat mengganggu dan bahkan merusak keseimbangan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat harus diciptakan guna menjaga kelestarian lingkungan.

Penggunaan lahan yang tidaksesuai dengan fungsi kawasan dapat berpotensi pada beberapa dampak negatif, seperti rusaknya lingkungan serta produktifitas lahan yang tidak optimal. Semua itu

berpengaruh pada permukiman yang berada pada kawasan-kawasan rentan seperti kawasan lindung, maupun penyangga. Hal yang ditakutkan adalah terjadinya longsor akibat ketidakmampuan sifat lahan dalam menopang penggunaan di atasnya.

Mayoritas ketidaksesuaian terhadap arahan fungsi kawasan yang ada di daerah penelitian ini, disebabkan karena penggunaan lahan yang ada tidak sesuai dengan karakteristik fisik setiap fungsi kawasan. Secara ekologi dilihat dari arahan kawasan, daerah-daerah yang tidak sesuai ini masuk dalam kategori penyangga atau bahkan lindung yang aktivitasnya seharusnya dibatasi dengan pengolahan tanah minim, namun dilihat dari aspek lain daerah ini merupakan tempat bergantungnya masyarakat untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka. Hal yang dikhawatirkan dari ketidaksesuaian tersebut adalah ketidakmampuan fisik setiap kawasan menopang berbagai jenis penggunaan lahan yang ada, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat, bahkan dapat berpotensi bencana. Perlunya tindakan atau memberikan solusi untuk merelokasi penggunaan lahan yang ada bagi pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Solusi yang dapat diberikan untuk menanggapi ketidaksesuaian tersebut adalah dengan tetap memperhatikan pengelolaan penggunaan lahan yang sudah ada, serta membatasi aktivitas yang dinilai merugikan lingkungan dan dapat mengurangi keseimbangan ekologi. Pencegahan agar ketidaksesuaian lahan tersebut tidak memberikan dampak yang lebih buruk bagi alam itu sendiri maupun masyarakat.

Informasi kepada masyarakat tentang arahan fungsi kawasan dan kaitannya dengan penggunaan lahan juga bisa dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat membuka atau meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa tidak semua lahan dapat menopang segala jenis penggunaan lahan. Kesadaran itulah yang nantinya akan menciptakan dan membentuk suatu kepedulian masyarakat, sehingga mereka menjaga lingkungan yang ia tempati, dan berusaha melakukan pengolahan serta pengelolaan yang tepat agar lingkungan tidak rusak. Pada dasarnya masyarakat memiliki ketergantungan (*simbiosis*) terhadap lingkungannya, jika lingkungannya rusak atau bahkan sampai terjadi bencana, maka produktivitas yang dihasilkan masyarakatpun juga akan menurun.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Arahan fungsi kawasan di Kabupaten Pati berdasarkan faktor curah hujan, jenis tanah dan lereng terbagi menjadi 4 kelas yaitu: arahan fungsi kawasan lindung, arahan fungsi kawasan penyangga, arahan fungsi budidaya tanaman tahunan dan arahan fungsi budidaya tanaman musiman dan permukiman. Empat kelas kawasan yang memiliki jumlah luasan paling besar yaitu kawasan budidaya tanaman musiman dan permukiman sebesar 1227,32 km² atau sekitar 77,67% dari total luas wilayah. Kawasan budidaya tanaman musiman atau pertanian merupakan daerah yang memiliki lereng datar yang produktif untuk lahan pertanian. Kondisi ini menandakan Kabupaten Pati sebagian besar wilayahnya berupa daerah dataran.
2. Penggunaan lahan Kabupaten Pati tahun 2015 memiliki beberapa jenis lahan yaitu hutan, permukiman, tambak, tegalan, perairan, kebun dan sawah. Persebaran lokasi jenis lahan seperti

permukiman, tegalan dan sawah berada hampir diseluruh wilayah. Luas lahan yang mendominasi berupa lahan sawah sebesar 73.683 ha atau 46,63% dari luas total wilayah. Dilihat dari data tersebut hampir seluruh masyarakat memiliki mata pencarian seorang petani. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Pati dapat disebut sebagai salah satu daerah pertanian.

3. Kesesuaian arahan fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan diperoleh hasil kawasan lindung sebesar 1,47%, kawasan penyangga sebesar 5,34%, kawasan budidaya tanaman tahunan sebesar 1,87% dan kawasan budidaya tanaman musiman dan permukiman sebesar 70,67%, sedangkan kawasan penggunaan lahan yang tidaksesuai terhadap arahan fungsi kawasan diperoleh hasil kawasan lindung sebesar 1,23%, kawasan penyangga sebesar 10,1%, kawasan budidaya tanaman tahunan sebesar 2,32% dan kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman sebesar 7%. Jadi total seluruh kesesuaian penggunaan lahan pada arahan fungsi kawasan di daerah penelitian sebesar 79,35% atau 1.253,96 km², sedangkan total seluruh ketidaksesuaian penggunaan lahan di daerah penelitian sebesar 20,65% atau 326,27 km² dari luas total daerah penelitian. Kondisi demikian menandakan wilayah Kabupaten Pati jenis lahannya hampir sesuai dengan arahan fungsi kawasan.

Berdasar hasil yang diperoleh menunjukkan masih adanya tingkat penyimpangan penggunaan lahan terhadap arahan fungsi kawasan di daerah penelitian, sehingga dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat terkait arahan fungsi kawasan beserta jenis penggunaan yang tepat pada setiap kawasan, sehingga dapat membuka kesadaran masyarakat agar lebih bijaksana dalam menggunakan lahan, terutama lahan pada kawasan yang dinyatakan tidak sesuai dengan fungsi. Melakukan evaluasi, dan membuat perencanaan dalam penataan ruang yang lebih detail terkait penggunaan ruang. Serta memberikan prioritas perhatian pada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, terutama permukiman yang berada di kawasan lindung.
2. Bagi masyarakat serta petani, dalam usaha pengelolaan lahan terutama di kawasan-kawasan yang tidak sesuai pada arahan fungsi kawasan sebaiknya tetap memperhatikan upaya konservasi agar kelestarian dan keseimbangan ekologi tetap terjaga.
3. Bagi pembaca, penelitian ini hanya bersifat sebagai arahan perencanaan dari aspek ekologis. Hasilnya sebatas arahan fungsi kawasan secara umumnya saja, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan diintegrasikan dengan aspek lain guna mendapatkan hasil penentuan fungsi kawasan yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, Agus Martono. 1997. *Teknik – Teknik Sampling Penelitian Geografis*. Surakarta: Fakultas Geografi UMS.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- SK Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 1990. Jakarta. <https://mrbudisantoso.files.wordpress.com/2009/02/kriteria-hlhp-keppresmentan.pdf> . 11 Oktober 2015.
- Tika, Moh. Pabundu. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang: Penataan Ruang. 2007. Jakarta. <http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/uu26-2007%20-%20Tata%20Ruang.pdf> . di akses 11 Oktober 2015.